

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era pasar bebas sekarang ini, kondisi pasar semakin ketat bersaing untuk memperlihatkan keunggulannya. Hal ini perusahaan diharuskan untuk melakukan aktifitas seefisien dan seefektif mungkin agar bisa meningkatkan daya saing serta mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya dalam jangka panjang. Dengan adanya pasar bebas tersebut, dapat dijadikan peluang untuk memperluas penguasaan pasar pada bidang usaha milik pelaku usaha. Usaha yang saat ini sedang menjadi perhatian Pemerintah adalah para UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

UMKM adalah salah satu usaha yang banyak diminati oleh masyarakat karena bisa memberikan dampak besar bagi perekonomian negara. UMKM harus didorong dan didukung supaya tetap eksis, sehingga bisa memperluas lapangan pekerjaan serta kesempatan usaha. Kontribusi UMKM terhadap negara selalu mengalami peningkatan, dapat dilihat dari jumlah UMKM yang terus berkembang ataupun bertambah di Indonesia yang juga turut membantu dalam pemulihan ekonomi nasional. Namun ada permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM saat ini yaitu masalah pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan ini berisi tentang perencanaan sumber daya guna diolah dengan efisien serta efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Mulai dari merencanakan anggaran, pencatatan, pelaporan serta pengendaliannya. Umumnya pelaku UMKM belum sadar akan pentingnya pengelolaan keuangan tersebut, untuk melihat sehat tidaknya usahanya. Hal ini, menjadi salah satu pusat perhatian utama oleh Bank Indonesia.

Menurut Bank Indonesia UMKM dinilai memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat mendukung sistem keuangan serta stabilitas ekonomi. Akan tetapi, dalam mengembangkan UMKM masih mengalami kendala seperti pada akses keuangan. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan UMKM dalam menyusun laporan keuangannya. Pengelolaan keuangan seringkali menjadi masalah karena usaha UMKM sering mengabaikan pentingnya pengelolaan keuangan dalam usahanya. Dengan adanya penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan pada UMKM menjadi sangat penting untuk diterapkan. Sehubungan dengan masalah yang dihadapi UMKM tersebut, maka Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sudah mempublikasikan SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah) guna membantu UMKM supaya lebih akuntabel, efisien, serta transparan.

DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) IAI menyetujui SAK EMKM pada rapatnya tanggal 18 Mei 2016, serta berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018. SAK EMKM diharapkan bisa membantu transisi entitas dari laporan keuangan berbasis kas ke akrual. SAK EMKM yang dipublikasikan diharapkan bisa menjadi pendorong pengetahuan keuangan UMKM Indonesia untuk mendapat pembiayaan yang lebih luas dari industri perbankan. Pada masa mendatang, SAK EMKM diharapkan bisa dijadikan dasar penyusunan serta perumusan standar ataupun standar akuntansi UMKM. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh para UMKM untuk mengelola keuangannya dengan baik untuk memberikan kunci keberhasilan UMKM serta dapat digunakan untuk mengambil langkah strategis dalam mempertahankan keberlanjutan bidang usahanya. Sekarang ini terdapat banyak bidang usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM di Indonesia. Contohnya yaitu UMKM Kuliner, UMKM

Digital, UMKM Agrobisnis, UMKM Produk Kreatif/Kerajinan, UMKM Kecantikan, UMKM Pendidikan, dan sebagainya.

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu kota yang terkenal dengan julukan sebagai Bumi Reog Ponorogo. Kabupaten Ponorogo mempunyai luas sebesar 1.371,78 km² dengan memiliki keanekaragaman budaya dan potensi perekonomian yang sangat baik. Ponorogo berkontribusi paling besar di wilayah Se-Karesidenan Madiun dalam penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) senilai 19 Milyar lebih.

Tabel 1.1
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Madiun dan Sekitarnya Tahun 2018

Kabupaten/Kota	PDRB ADHB (Milyar Rp)
Kab. Pacitan	15.010,81
Kab. Ponorogo	19.257,49
Kab. Madiun	17.679,14
Kab. Magetan	17.673,22
Kab. Ngawi	19.241,79
Kota Madiun	13.190,38

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo

PDRB adalah ukuran penting yang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat dilihat dari meningkatnya laju PDRB. Hasil pada penelitian Aulia (2021) menunjukkan bahwa ternyata pertumbuhan UMKM dan tenaga kerja UMKM merupakan salah satu faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB perkapita di Kabupaten Ponorogo sebesar 34,2%. Jumlah UMKM di Ponorogo yang memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2013 berjumlah 1.091 unit, pada tahun 2014 mengalami penurunan lagi menjadi 1.012, pada tahun 2015 meningkat menjadi 1020, namun menurun lagi pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 1018 dan 2016 unit

penyebaran UMKM terbanyak berada di wilayah Kecamatan Ponorogo yang hampir mendekati nilai setengah total UMKM.

Salah satu jenis UMKM yang terletak di Kabupaten Ponorogo adalah UMKM pengrajin Reog. Menurut Dinas Indakop Kabupaten Ponorogo, UMKM pengrajin Reog menduduki 30% dari jumlah total banyaknya UMKM di Ponorogo. Produk yang dihasilkan juga tidak kalah berkualitas dan tidak kalah saing dengan UMKM lainnya. Adapun produk yang dibuat oleh pengrajin reog ini membuat perlengkapan atribut reog Ponorogo yaitu antara lain dadak merak, barongan, eblek (jaranan), kendang, ketipung terompet, angklung, baju jathil, baju ganongan, topeng klono sewandono, topeng bujang ganong, dan sebagainya.

Kerajinan reog ini mempunyai potensi yang cukup meyakinkan untuk berkembang secara pesat. Pasalnya pengrajin Reog sangat berperan terhadap kesenian Reog Ponorogo yang membawa nama Ponorogo sehingga dikenal masyarakat Indonesia hingga masyarakat mancanegara. Prospek kerajinan Reog ini semakin menggembirakan karena seni Reog sekarang ini merupakan salah satu andalan pariwisata Ponorogo berskala nasional bahkan internasional. Bahkan pemerintah Kabupaten Ponorogo sejak tahun 1994 semakin memantapkan dalam memelihara dan melestarikan kesenian dan budaya Reog dengan menyelenggarakan festival Reog tingkat nasional setiap tahunnya (Kristiyana, 2017). Hariyawan mengungkapkan bahwa Reog Ponorogo masih menunggu waktu untuk mendapat pengakuan sebagai warisan budaya dunia oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) (*18news.id*, 2020). Keadaan tersebut telah membawa angin segar bagi pengrajin Reog di Ponorogo untuk kemajuan kerajinan Reog. Karena, hasil penjualan dari peralatan kesenian Reog Ponorogo rata-rata bisa mencapai 75 juta per minggu

(Antarnews, 2018). Hal tersebut, berpengaruh pada perkembangan kesenian reog sebagai aset daerah yang akan berdampak baik untuk kegiatan para pengrajin reog sebab sebagai produsen atas seluruh atribut reog serta cukup menjanjikannya potensi pasar terhadap permintaan reog di Indonesia maupun Internasional dan bisa meningkatkan perekonomian daerah dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, serta diharuskan didukung oleh produktivitas pengrajin reog yang semakin kompetitif, berkualitas, dan maju. Namun, sering terjadi terdapat pemilik yang tidak pernah menghitung penghasilan bersihnya berapa. Hal tersebut kemungkinan akibat minimnya kesadaran pentingnya pengelolaan keuangan yang bisa saja mengakibatkan kegagalan usaha. Menurut Rapini et al. (2013) kendala yang sering dialami oleh para UMKM di Ponorogo yaitu 52% tidak mempunyai perencanaan jangka panjang, sistem pengelolaan keuangan yang memadai, ataupun alat-alat kegiatan manajerial lain yang umumnya diperlukan oleh suatu bisnis.

Penelitian terdahulu telah ada yang membahas mengenai analisis pengelolaan keuangan pada UMKM. Seperti yang dilaksanakan oleh Sita, *et al.* (2019) yang menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh UMKM Rumah Tahanan Negara terdiri dari perencanaan, pencatatan, serta pengendalian. Berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Putri, *et al.* (2019) menyimpulkan bahwa pada UMKM keripik ketela dan pisang belum maksimal dalam mengelola keuangannya. Sebagaimana penelitian Khadijah, *et al.* (2021) menyimpulkan pengelolaan keuangan pada UMKM di Batam Kota belum maksimal dan sangatlah sederhana serta tidak ada pelaporan atas keuangan usahanya. Namun, Kuswadi (2005:5) menyebutkan UMKM yang baik menerapkan pengelolaan keuangannya yang bisa dilihat melalui adanya penerapan perencanaan pemakaian anggaran, pengendalian, pelaporan, serta pencatatan.

Berdasar pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengrajin Reog di Kabupaten Ponorogo. Pada penelitian terdahulu dapat persamaan antara penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan keuangan, akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada permasalahan, subjek penelitian, dan metode penelitian yang digunakan. Hasil penelitiannya diharapkan bisa menjadi pedoman, jika UMKM-nya belum mengimplementasikan pengelolaan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada penjelasan dalam latar belakang, permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana pengelolaan keuangan yang diterapkan UMKM oleh Pengrajin Reog di Kabupaten Ponorogo?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini terkait pengelolaan keuangan yang memuat pemakaian anggaran, pelaporan, pencatatan, serta pengendalian yang diterapkan oleh UMKM Pengrajin Reog di Kabupaten Ponorogo.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan yang diterapkan UMKM Pengrajin Reog di Kabupaten Ponorogo.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kebermanfaatan yang bersifat teoritis serta praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Menambah wawasan terkait pentingnya pengelolaan keuangan dalam lingkungan UMKM Pengrajin Reog.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bahwa peneliti bisa memberi suatu informasi serta bahan masukan kepada pengelola UMKM Pengrajin Reog tentang pentingnya pengelolaan keuangan dengan pendekatan studi kasus.